

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dirga, Sustira dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menimbang Ketentuan Penyadapan Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal. 2012. *Menorobos Positivisme Hukum*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Hamzah, Chandra M. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia.
- Hamzah, Jur Andi. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmawati, Putri. 2012. *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Data dan Informasi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Kristian dan Yopi Gunwan . 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Manthovani, Reda. 2015. *Penyadapan vs Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samosir, C Djisman. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Susanti, Diah Imaningrum. 2015. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. Malang: IPHLS.
- Wahid, Abdul dkk. 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu

## **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Beranda Yusticia. 2018. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta : C Klik Media.

## **Artikel dalam Jurnal**

Aji, A. M. Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis

Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan

Teori Hukum). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1. Juni 2013.

Barama, M. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal*

*Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 8. November 2016.

Christianto, H. Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana.

*Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 2 . Tahun 2016.

Elias, R. F. Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal*

*LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2014.

Ginting, S. Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan

Agama Oleh Ahok. *Law Pro Justitia*, Vol.2 No.2. Februari 2019.

Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. Penggunaan Bukti Elektronik Dalam

Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No.1. Februari

2020.

Juanda, E. Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah*

*Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2. September 2016.

Nasir, G.A.(2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat.

*Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2. September 2017.

- Nugroho, B. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, Vol. 32 No. 1. Januari 2017.
- Prayogo, T. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2. Tahun 2016.
- Sumariyastuti, S. H. D. Penyadapan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .*Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2 Nomor.2. Juni 2019.
- Susak, O. J. Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid. Prap/2015/Pn. Jkt. Sel. *Arena Hukum*, Vol. 9 No.1. April 2016.
- Vilano, D. Perlindungan Hak-hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana.*Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 3. Maret 2017.
- Wijayanta, T. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2. Mei 2014.
- Zolecha, C. A. Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana.*Verstek*, Vol.3 No. 2. Tahun 2015.

## **SKRIPSI/TESIS**

Nugraha, Achmad Adi. 2017. Analisis Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### **Artikel Dalam Internet**

Fitria, Raissa Anita. 2017. *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, dalam <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2192/1861>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

Gunawan,Rizki. 2014. *12-10-2002: Bom Bali I Rengut 202 Nyawa*, dalam <http://liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-rengut-202-nyawa>, diakses pada tanggal 1 November 2020.

Hutomo,Dimas.2019.*Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana*,dalam <http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

Hidayat, Rofiq. 2017. *Disepakati, Penyadapan Harus Mendapat Izin Pengadilan*, dalam <http://www.jurnal.hukumonline.com/berita/baca/It597868>

98d8d1f/ disepakati-penyadapan-harus-mendapat-izin-pegadilan/, diakses pada tanggal 23 maret 2021.

Sukarna, Kadi.2015. *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam <http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id/11617/5682/23.Kadi%20Sukarna.pdf?Sequence=1>, diakses pada tanggal 23 maret 2021.

Simatupang, Joseph Fajar. 2020. *Crime Control Model dan Due Process Model Kesatuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam <http://www.kompasiana.com/josephsimatupangsianturi/5f0c848bd541df66cd072e22/crime-control-model-dan-due-process-model-kesatuan-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia?Page=all>, diakses pada tanggal 23 maret 2021.

KBBI Daring. 2021. Bukti, diakses melalui [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti) diakses pada tanggal 23 Maret 2021

KBBI Daring .2021. Permulaan, diakses melalui [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permulaan](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permulaan),diakses pada tanggal 23 Maret 2021

KBBI Daring. 2021. Cukup, diakses melalui [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukup](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukup), diakses pada tanggal 23 Maret 2021

KBBI Daring. 2021. Keadaan, dikases melalui [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan), diakses pada tanggal 23 Maret 2021

KBBI Daring. 2021. Mendesak, [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendesak](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendesak), diakses pada tanggal 23 Maret 2021